

## **ORIENTASI DUNIA KERJA DALAM PROSES DAN STATUS AKREDITASI SMK**

**Oleh :  
Sukamto**

### **Abstrak**

Problematika kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan dunia kerja mempunyai dimensi yang sangat majemuk. Pertimbangan untuk mengambil kebijakan tentang prioritas pengembangan berbagai jenis dan jenjang pendidikan, sistem pemantauan dan evaluasi kinerja sekolah, dan indikator bakumutu yang responsif terhadap kebutuhan dunia usaha dan industri merupakan faktor-faktor yang diyakini dapat menjembatani kesenjangan tersebut. Tulisan ini mengemukakan kelemahan sistem akreditasi sederhana berdasarkan nilai siswa yang banyak dipakai untuk menilai keberhasilan sekolah selama ini, dan mengulas lebih rinci pedoman akreditasi yang sudah ada. Dengan sedikit tambahan aspek penilaian sekolah, sistem akreditasi ini kalau dilaksanakan dengan cermat dan obyektif akan menyumbang secara signifikan usaha untuk menyesuaikan dan mengaitkan keluaran dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

### **Pendahuluan**

Pada tahap-tahap awal era industrialisasi di Indonesia, permasalahan *mismatch* antara keluaran sistem pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Kesenjangan yang terjadi menyangkut berbagai dimensi, antara lain: kesesuaian jenis, jenjang dan isi substantif kurikulum pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan di sekolah. Hal ini antara lain disebabkan tidak tersedianya informasi dari dunia usaha dan industri yang dapat langsung dijabarkan menjadi kebijakan strategis di tingkat makro maupun kebijakan operasional di tingkat yang lebih mikro. Apabila persoalan-persoalan ini tidak segera mendapat pemecahan, akan mempunyai efek jangka panjang yang berlarut-larut dan menjadi lingkaran permasalahan yang lebih serius. Terutama dalam situasi

krisis yang melanda dunia industri dan mempunyai dampak langsung pada ketenagakerjaan akhir-akhir ini, kualitas dan kesesuaian sumberdaya manusia menjadi tolok ukur efisiensi dan jaminan satu-satunya kelangsungan eksistensi dunia usaha dan industri. Implikasi yang langsung bagi dunia pendidikan adalah kesiapan dan kemampuan sekolah untuk hanya menghasilkan lulusan yang benar-benar mempunyai kapasitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang akan menyerapnya.

Pengamatan di lapangan maupun berbagai data proyeksi perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Kedua (lihat misalnya: McMahan, dkk.: 1992 dan Boedionoo, dkk.: 1992) menunjukkan bahwa ditinjau dari prospek kebutuhan maupun kelayakan ekonomisnya, pendidikan menengah kejuruan masih merupakan investasi yang cukup baik sebagai sarana mempersiapkan tenaga kerja terampil tingkat menengah yang nantinya diharapkan mengisi kebutuhan tenaga pembangunan pada masa duapuluh lima tahun mendatang. Tentu saja untuk lebih memberikan jaminan keberhasilan, pengembangan pendidikan menengah kejuruan tersebut harus dilengkapi dengan pranata dan perangkat penilaian kinerja sekolah dan pengembangan kualitas yang handal dan bersifat sinambung. Dalam penyelenggaraannya, penerapan kriteria keberhasilan ini hendaknya selalu didasarkan pada dua aspek yang saling komplementer, yaitu keberhasilan internal yang menyangkut aspek penyelenggaraan proses belajar mengajar untuk mengembangkan potensi siswa, dan keberhasilan eksternal yang menyangkut sumbangan positif sekolah dalam kaitan dengan produktivitas lulusannya di lapangan kerja. Kedua kriteria keberhasilan tersebut menurut Finch (1984) merupakan dua sisi mata uang yang harus tercermin dalam visi dan misi pendidikan menengah kejuruan.

Pengukuran kinerja sekolah ini menyangkut mekanisme penilaian sekolah yang lazim disebut dengan istilah akreditasi. Permasalahan yang timbul adalah bahwa konsep, penerapan dan interpretasi dari istilah ini sangat bervariasi dalam konteks pendidikan kejuruan di Indonesia. Sebuah penelitian lapangan di Indonesia (Boediono, dkk.: 1992) menunjukkan

bahwa tidak ada perbedaan karakteristik pemekerjaan (*employment characteristics*) lulusan antara sekolah-sekolah kejuruan yang telah diklasifikasikan sebagai sekolah yang "baik", "sedang" dan "kurang". Hal ini memunculkan berbagai pertanyaan seputar akreditasi sekolah kejuruan di Indonesia, antara lain arti, maksud, kriteria, cakupan dimensi yang dinilai, dan pelaksanaan akreditasi itu sendiri. Di samping itu, hasil penelitian tersebut juga dapat ditafsirkan belum tersedianya instrumen yang mantap untuk membedakan kinerja sekolah, dalam hal ini untuk dimensi kemampuan lulusannya.

Kelemahan dari segi instrumentasi ini akan menjadi fokus paparan dalam artikel ini, terutama dilihat dari perangkat peraturan yang ada dan penerapannya di lapangan yang kadang-kadang lebih menonjolkan segi kepraktisan dan kemudahan implementasi dari pada berpegang pada jiwa peraturan sebagaimana yang diharapkan. Berturut-turut akan dikemukakan makna konseptual dan kajian pustaka menyangkut konsep akreditasi, dilanjutkan dengan suatu analisis data sekunder penerapan akreditasi sekolah yang dalam hal ini mengambil setting di Propinsi Jawa Barat, dan diakhiri dengan sumbangan pemikiran untuk penyempurnaan sistem dan mekanisme akreditasi sekolah kejuruan untuk dipertimbangkan di masa yang akan datang.

### **Kesenjangan Antara Dunia Pendidikan Dan Dunia Kerja**

Salah satu karakteristik pembangunan nasional di Indonesia adalah kemajemukan dimensinya dan kompleksitas cakupannya, yang mengharuskan berbagai sektor secara *interdependent* berjalan bersama-sama dalam menghadapi tantangan untuk mencapai tujuan. Untuk kalangan pendidikan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tercermin dalam dinamika dunia kerja merupakan tantangan besar yang menuntut kepekaan dan sikap tanggap yang dinamis. Keterkaitan antara dunia pendidikan dan kebutuhan dunia kerja inilah yang di beberapa negara tetangga telah menunjukkan peran yang sangat nyata dalam menunjang pertumbuhan

ekonomi dan kemajuan bangsa. Hal inipun sebenarnya sudah diamanatkan dalam GBHN 1993 yang menyatakan bahwa perluasan kesempatan kerja dan pembinaan sistem pendidikan yang mampu menghasilkan tenaga kerja yang diperlukan harus dilaksanakan secara bersama dan serasi.

Dalam memorandum pandangan BPPN (Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional) yang menyangkut masalah pendidikan dan dunia kerja, disinyalir adanya dua masalah pokok yang menggambarkan kesenjangan antara sektor pendidikan dan ketenagakerjaan (Makagiansar, 1992). Pertama, kecilnya pertambahan lapangan kerja dibandingkan dengan laju pertumbuhan jumlah lulusan sebagai akibat laju pertumbuhan ekonomi yang berkisar antara lima sampai tujuh persen. Yang kedua, adanya ketidaksesuaian antara jenis pengetahuan akademik maupun keterampilan di sekolah dengan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Kesenjangan kuantitatif ini sempat memicu peningkatan partisipasi swasta dalam mendirikan sekolah dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, yang sudah tentu menimbulkan masalah pengendalian mutu yang tidak sederhana. Dalam aspek kualitatif, sempat muncul polemik tentang klasifikasi lulusan pendidikan, dengan maraknya perdebatan tentang istilah "siap pakai", "siap latih" dan "siap dilatih kembali". Agaknya pihak-pihak yang berpolemik menyadari betul betapa mendesaknya kebutuhan akan tenaga terampil, tetapi tidak menutup kenyataan sulitnya penyesuaian di tempat kerja dan sangat cepatnya keterampilan dan pengetahuan menjadi usang (*obsolete*) karena perubahan yang sangat dinamis.

Di satu pihak ada keinginan yang terlalu jauh untuk mengsubordinasikan sistem pendidikan di bawah kendali kebutuhan ketenagakerjaan, tetapi di lain pihak ada tindakan yang didasarkan pada asumsi bahwa keduanya adalah dunia terpisah yang tidak perlu dipaksakan pertautannya dalam penyelenggaraan operasional sehari-hari.

Pendidikan kejuruan diselenggarakan dengan maksud mempersiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional (PP Nomor 29/1990 Pasal 3 ayat 2). Meskipun penafsiran bunyi

pasal tersebut dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan tenaga terampil dalam bidang dan tingkat tertentu, namun penekanan utama adalah pada kemampuan lulusan sekolah kejuruan yang siap dilatih untuk menyesuaikan dengan konteks pekerjaan di industri, dan siap dilatih kembali untuk mengantisipasi perkembangan dunia usaha yang pesat dari waktu ke waktu, misalnya dengan mengikuti pendidikan atau pelatihan lanjut di bidangnya. Dalam pengertian yang luas dan penuh antisipasi, pendidikan kejuruan yang tumbuh dari kebutuhan nyata di masyarakat ini didefinisikan sebagai berikut:

*...vocational education and occupational education are intended to mean any form of education, training and retraining designed to prepare persons to enter or continue in paid employment in any recognized occupation (Calhoun and Finch, 1976 : 3)*

Kerancuan timbul dalam penjabaran definisi tersebut menjadi program pendidikan dan pelatihan, antara lain di Indonesia yang menempatkan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dalam dua departemen yang berbeda, yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Tenaga Kerja. Pemerintah telah berusaha membuat klarifikasi dan mengatur penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tersebut antara lain lewat peraturan pemerintah yang relevan. PP Nomor 29 Tahun 1990 mengatur tentang Pendidikan Kejuruan, PP Nomor 71 Tahun 1991 mengatur tentang Latihan Kerja, sedangkan PP Nomor 73 Tahun 1991 mengatur tentang Pendidikan Luar Sekolah. Namun demikian, pertautan kepentingan antar unit kerja yang berbeda tersebut tetap saja memunculkan nuansa persaingan bidang garapan program dan menimbulkan kesulitan koordinasi. Tidak jarang dijumpai beberapa instansi membuat program yang hampir sama dengan target sasaran yang sama pula, dan banyak dijumpai metode pelatihan yang tidak berbeda jauh dengan metode untuk pendidikan, padahal sifat, waktu dan tujuan program jelas harus dibedakan.

Pada waktu akhir-akhir ini, ada usaha dari pihak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengadakan kaji ulang kebijakan pemerintah tentang pendidikan kejuruan menghadapi dinamika perkembangan masyarakat terutama dunia kerja. Satuan tugas (*task force*) yang menggarap masalah ini (Task Force TVE Policy Development, 1995) antara lain menghasilkan tigabelas rumusan kebijakan, satu di antaranya adalah rekomendasi untuk mengintegrasikan pendidikan dan pelatihan dalam perspektif *cognitive science*. Hal ini senada dengan berbagai pemikiran di luar negeri yang mendeteksi persoalan yang sama (Raizen, 1989). Rekomendasi lain yang akan mempunyai implikasi luas adalah kebijakan kurikulum yang sepenuhnya akan mengacu kepada seperangkat bakumutu nasional, baik dalam desain maupun implementasi yang berorientasi kepada kompetensi. Pada waktu tulisan ini dibuat, tindak lanjut dari berbagai rekomendasi tersebut masih belum nampak secara nyata, meskipun usaha-usaha pengembangan dan rintisan dalam bentuk *pilot project* terus senantiasa dilakukan.

Adalah suatu realitas obyektif bahwa kriteria keberhasilan pendidikan kejuruan tidak dapat hanya dinilai berdasarkan upaya-upaya sepihak untuk selalu mengadakan penyempurnaan sistem, strategi dan kebijakan operasional di sekolah. Apresiasi masyarakat terutama pemakai lulusan, akan juga dipengaruhi oleh dinamika dan daya serap lapangan kerja, sehingga pemikiran tentang akreditasi sebagai suatu konsep penilaian kinerja sekolah hanya akan berfungsi optimal jika mempertimbangkan juga faktor-faktor eksternal yang erat kaitannya dengan hal-hal tersebut.

#### **Sistem Akreditasi: Konsep Kualitas Sekolah**

Salah satu penyebab rendahnya apresiasi masyarakat terhadap pendidikan kejuruan adalah tidak adanya ukuran yang baku dan fungsional untuk menilai keberhasilan suatu sekolah kejuruan. Evaluasi yang dilakukan masyarakat kemudian terkesan semena-mena dan sarat dengan muatan kepentingan yang antara satu dengan lainnya mungkin berbeda.

Keberhasilan beberapa sekolah yang sudah dikenal reputasinya oleh dunia usaha dan industri mau tidak mau dapat tenggelam dalam generalisasi yang berlebihan tentang kegagalan dan rendahnya mutu lulusan pendidikan kejuruan, yang pada dasarnya diwarnai oleh banyaknya sekolah yang tidak memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program pendidikan kejuruan. Tudingan inilah yang kemudian diikuti dengan upaya remedial berupa tambalsulam kurikulum dan berbagai penataran guru dengan biaya yang sangat besar dan hasil yang masih diragukan keefektifannya.

Dalam hubungan ini memang para ahli nampaknya sepakat (Finch, 1984; Sukanto, 1988, dan McMahon, *et al.*, 1992) bahwa keberhasilan pendidikan kejuruan harus dinilai mempergunakan kriteria yang lebih kompleks dibandingkan kriteria penilaian terhadap sekolah menengah umum. Kriteria tersebut mencakup indikator keberhasilan dalam penyelenggaraan proses pembelajaran dan indikator keberhasilan dalam membantu lulusannya memasuki lapangan kerja. Bahkan perlu juga dilihat kejelian dan kepekaan sekolah dalam menafsirkan "market signal" untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan efektivitas program di sekolah. Swanson (1984) mengemukakan konsep *educational excellence* dengan menekankan dimensi dan kategori yang dapat difungsikan sebagai taksonomi penilaian kualitas. Taksonomi tersebut meliputi keunggulan dalam dimensi siswa yang memasuki sekolah, kelembagaan, program dan sistemnya. Walter (1983) mengemukakan delapan kriteria atau aspek yang harus dimasukkan dalam akreditasi kelembagaan pendidikan guru, yaitu (a) organisasi, (b) kurikulum, (c) kegiatan pembelajaran, (d) staf pengajar, (e) layanan peserta didik, (f) fasilitas pendidikan, (g) dukungan biaya penyelenggaraan, dan (h) sistem evaluasi. Boediono, dkk. (1992) menggunakan 54 indikator untuk menetapkan peringkat sekolah, yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu (a) karakteristik sekolah, (b) karakteristik guru, dan (c) karakteristik siswa.

Kesamaan dari literatur yang dikaji tersebut di atas adalah masih dominannya paradigma input-proses dalam penilaian kualitas, yang di muka

sudah diutarakan ketimpangannya. Ketidaktepatan ini sudah dikonfirmasi melalui suatu penelitian yang sudah disinggung di bagian pendahuluan (Boediono, dkk.:1992). Perbedaan kategori sekolah baik, sedang dan kurang menurut penilaian tersebut tidak diikuti dengan perbedaan kinerja lulusan di dunia kerja, dalam hal ini diukur dari rerata penghasilan, indeks penyerapan lulusan memasuki lapangan kerja, dan waktu tunggu sejak lulus sekolah kejuruan sampai mendapatkan pekerjaan pertama. Temuan penelitian ini sekaligus mengangkat masalah validitas prediktif sebagai salah satu kriteria penentuan peringkat sekolah kejuruan.

### **Implementasi Akreditasi Dan Realitas di Lapangan**

Kebutuhan akan adanya sistem akreditasi yang mantap untuk lebih mendekatkan jurang pemisah antara masyarakat pemakai dengan penghasil tenaga kerja sudah lama disadari oleh kalangan pengambil kebijakan pendidikan. Istilah akreditasi tadinya erat terkait dengan pemberian status terhadap sekolah swasta, sebagaimana termuat dalam dua Surat Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen, yaitu SK Dirjen Nomor 019/C/Kep/1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta dan SK Dirjen Nomor 020/C/Kep/1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Swasta. Produk hukum yang paling mutakhir adalah ketentuan akreditasi sekolah yang termuat dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. Pasal ini antara lain menetapkan sistem akreditasi sebagai penilaian terhadap sekolah menengah dengan maksud untuk menetapkan peringkat sekolah tersebut dalam rangka pembinaan, pemeliharaan mutu, perlindungan masyarakat, dan pengaturan mobilitas atau mutasi siswa antar sekolah.

Komponen sekolah yang dijadikan faktor penentu jenjang akreditasi ada tujuh macam, yaitu meliputi: (a) Administrasi sekolah, (b) Kelembagaan, (c) Ketenagaan, (d) Kurikulum, (e) Siswa, (f) Sarana dan prasarana, dan (g) Situasi umum. Pemberian nilai untuk masing-masing komponen

tergantung dari banyaknya sub-sub komponen yang dinilai dan bobotnya, dan dapat dilihat dalam Tabel 1.

**Tabel 1. Komponen dan Bobot Penilaian Akreditasi Sekolah**

No.	Komponen Yang Dinilai	Jumlah Subkomponen	Nilai maksimum
1	Administrasi Sekolah	10	1400
2	Kelembagaan	5	800
3	Ketenagaan	9	1900
4	Kurikulum	12	1800
5	Siswa	9	1200
6	Sarana dan Prasarana	14	2100
7	Situasi Umum	7	800
	Jumlah	66	Maks. 10.000

*Sumber : Soetjipto, 1992 : hal. 53-56.*

Meskipun secara teoritis pedoman pelaksanaan tersebut sudah sangat ideal, tetapi dalam pelaksanaannya banyak dijumpai kendala. Pertama adalah asumsi lama yang menganggap bahwa yang perlu dikenai akreditasi adalah sekolah swasta, sehingga ketika aturan itu diterapkan di sekolah negeri banyak hal yang harus ditambah atau disesuaikan. Kedua menyangkut metodologi pengumpulan data yang memerlukan waktu lama dan biaya cukup besar. Ketiga adalah kendala praktis yang didasarkan asumsi bahwa sekolah yang baik adalah yang siswanya mencapai NEM (nilai ebtanas murni) tinggi di akhir program. Dengan sendirinya banyak pihak, terutama Kanwil Depdikbud dan masyarakat awam, yang mendasarkan penilaian terhadap sekolah dari aspek yang ketiga ini, yang meskipun kurang lengkap tetapi menjawab secara praktis dan cepat keinginan untuk mengetahui peringkat sekolah yang ada.

Sebagai ilustrasi disajikan data sekunder peringkat sekolah kejuruan di Propinsi Jawa Barat yang didasarkan pada Laporan dan Pengolahan

Hasil Ebtanas Propinsi Jawa Barat 1993-1994. Tabel 2, Tabel 3 dan Tabel 4 masing-masing menunjukkan perolehan NEM dan peringkat sekolah untuk SMK Rumpun Teknologi, Ekonomi, dan Pariwisata.

**Tabel 2. Perolehan NEM dan Peringkat Sekolah Kejuruan Teknologi (STM)**

No.	NAMA SEKOLAH	PMP		BAHASA INDONESIA		TOTAL	
		NEM	R	NEM	R	NEM	R
01	STMPemb.Bandung	7,05	1	7,42	4	14,47	1
02	STMPenerb. Bandung	6,56	2	7,15	11	13,71	4
03	STM N Cianjur	6,29	9	6,10	143	12,39	34
04	STM N Ciamis	6,17	14	6,76	35	12,93	13
05	STM N Cirebon	6,06	19	6,91	20	12,97	12
06	STM N 5 Bandung	6,05	20	6,72	39	12,77	19
07	STM N 1 Bandung	5,92	29	6,38	81	12,30	40
08	STM N Majalengka	5,91	31	6,33	89	12,24	44
09	STM N Bekasi	5,84	36	6,22	117	12,06	64
10	STM N Garut	5,75	44	6,33	90	12,08	61

*R = peringkat sekolah dihitung untuk seluruh sekolah negeri dan swasta yang jumlahnya N = 373*

**Tabel 3. Perolehan NEM dan Peringkat Sekolah Kejuruan Ekonomi (SMEA)**

No.	NAMA SEKOLAH	PMP		BAHASA INDONESIA		TOTAL	
		NEM	R	NEM	R	NEM	R
01	SMEA N Bogor	6,43	4	7,12	12	13,55	6
02	SMEA N Ciamis	6,40	5	7,01	16	13,41	8
03	SMEA N Rangkasbitung	6,24	11	6,58	53	12,82	18
04	SMEA N Cianjur	6,15	15	7,04	14	13,19	11
05	SMEA N Karawang	6,07	17	6,77	33	12,84	15
06	SMEA N Garut	6,02	23	6,62	49	12,64	26
07	SMEA N Tasikmalaya	5,97	26	7,35	6	13,32	9
08	SMEA N 2 Bandung	6,05	21	6,55	61	12,60	28
09	SMEA N Sukabumi	5,04	35	7,45	3	13,29	10
10	SMEA N Sumedang	5,73	47	6,87	21	12,60	29

*R = peringkat sekolah dihitung untuk seluruh sekolah negeri dan swasta yang jumlahnya N = 373*

**Tabel 4. Perolehan NEM dan Peringkat Sekolah Kejuruan Pariwisata (SMKK)**

No.	NAMA SEKOLAH	PMP		BAHASA INDONESIA		TOTAL	
		NEM	R	NEM	R	NEM	R
01	SMKK N Bogor	5,94	28	6,58	54	12,52	31
02	SMKK N Cirebon	5,80	40	6,77	34	12,57	30
03	SMKK Purwakarta	5,74	46	5,44	323	11,18	162
04	SMKK N1 Bandung	5,59	65	6,75	37	12,34	38
05	SMKK N Baleendah	5,53	73	6,56	60	12,09	60
06	SMKK Baranangsiang	5,43	90	6,22	118	11,65	94
07	SMKK N Sukabumi	5,25	142	7,12	13	12,37	36
08	SMKK N Garut	5,23	149	6,10	145	11,33	134
09	SMKK N Cimahi	5,13	172	5,98	188	11,11	180
10	SMKK N Tangerang	4,99	214	5,73	255	10,72	248

*R = peringkat sekolah dihitung untuk seluruh sekolah negeri dan swasta yang jumlahnya N = 373*

Dari tabel-tabel tersebut di atas segera nampak bahwa indikator perolehan NEM siswa tidak dapat memberikan gambaran yang conclusive tentang peringkat mutu sekolah secara keseluruhan. Dari dua matapelajaran yang diujikan saja sudah nampak betapa sulitnya menyimpulkan peringkat suatu sekolah, apalagi kalau ditambahkan matapelajaran lainnya yang dianggap lebih mencerminkan pelajaran kejuruannya, yaitu yang diujikan di masing-masing rumpun sekolah kejuruan. Dengan kata lain alasan kemudahan pengumpulan data dan kepraktisan untuk diinformasikan kepada masyarakat adalah alasan yang tidak tepat, karena data atau informasi tersebut akan memberikan distorsi yang sangat menyesatkan. Dan memang dalam pedoman pelaksanaan akreditasi, prestasi siswa hanyalah mewakili satu butir dari komponen kurikulum dan komponen kesiswaan yang jumlahnya masing-masing duabelas dan sembilan butir.

Ada yang berasumsi bahwa NEM pada hakekatnya mewakili keadaan sekolah dalam aspek-aspek kemampuan guru, kelengkapan sarana prasarana, potensi siswa dan intensitas proses pembelajaran. Namun harus juga disadari bahwa menentukan peringkat sekolah dengan indikator NEM ini berarti terlalu menyederhanakan persoalan kualitas sekolah, mengingat faktor-faktor lain yang ikut menentukan perolehan NEM siswa yang mungkin samasekali di luar kemampuan kendali sekolah. Belum lagi kalau dipertimbangkan sejauh mana indikator ini menunjukkan kemampuan lulusan dalam bersaing memasuki lapangan kerja. Perlu diingat bahwa data yang dikutip di atas memang tidak dimaksudkan sebagai mekanisme resmi akreditasi sekolah kejuruan di Propinsi Jawa Barat, tetapi diteliti dan ditulis untuk artikel ini sekedar untuk menggambarkan implikasi berupa kemungkinan distorsi yang akan dimunculkan jika indikator itu digunakan untuk menginformasikan mutu sekolah kepada masyarakat.

Sebagai gambaran untuk menambah argumentasi mengenai kelemahan dan distorsi indikator kualitas ini, dalam Tabel 5 disajikan korelasi tatajenzang untuk mengungkap hubungan antara peringkat NEM sekolah dengan indikator lain, yaitu indeks kualitas sekolah yang didasarkan

pada gabungan indikator kualifikasi dan kemampuan kepala sekolah dengan kelengkapan sarana prasarana dan kinerja sekolah. Data yang disebut akhir ini adalah hasil olahan dari Laporan Studi Direktorat Dikmenjur tentang hubungan antara karakteristik kepala sekolah dengan kualitas sekolah (Dikmenjur, 1996). Indikator karakteristik kepala sekolah sudah memperhitungkan profil kemampuan yang mencakup tujuh macam peran kepala sekolah kejuruan, yaitu sebagai (a) manajer, (b) pemimpin, (c) administrator, (d) wiraswastawan, (e) supervisor, (f) pembina iklim kerja, dan (g) pendidik. Studi selengkapnya dilakukan oleh suatu Tim Penyusun Profil Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (IATVEP-B, 11995).

**Tabel 5. Korelasi Tatajenjang Peringkat NEM dengan Indeks Mutu Sekolah**

Nama Sekolah (SMK Teknologi)	R1	R2	Nama Sekolah (SMK Ekonomi)	R1	R2
STMPemb.Bandung	1	2	SMEA N Bogor	1	2,5
STMPenerb. Bandung	2	6	SMEA N Ciamis	2	1
STM N Cianjur	6	7	SMEAN Rangkasbitung	7	4,5
STM N Ciamis	4	1	SMEA N Cianjur	5	10
STM N Cirebon	3	4	SMEA N Karawang	6	8
STM N 5 Bandung	5	4	SMEA N Garut	8	4,5
STM N 1 Bandung	7	4	SMEA N Tasikmalaya	3	8
STM N Majalengka	8	8	SMEA N 2 Bandung	9	8
STM N Bekasi	10	9	SMEA N Sukabumi	4	6
STM N Garut	9	10	SMEA N Sumedang	10	2,5
Indeks korelasi $\rho$ (rho) = 0,758 P < 0,05			Indeks korelasi $\rho$ (rho) = 0,309 P > 0,05		

*Catatan : R1 = peringkat sekolah menurut perolehan NEM di antara sepuluh SMK*

*R2 = peringkat sekolah menurut indeks gabungan indikator kepala sekolah + sekolah*

Dari tabel di atas ternyata korelasi antara kedua peringkat tersebut menunjukkan angka yang signifikan untuk kelompok Sekolah Menengah

Kejuruan Teknologi (STM), tetapi tidak signifikan untuk kelompok Sekolah Menengah Kejuruan Ekonomi. Data ini menunjukkan sekali lagi bahwa NEM belum dapat dipakai sebagai kriteria ukuran untuk menentukan peringkat sekolah secara mantap, terbukti hubungannya dengan indikator kepala sekolah dan sekolah yang komponen butir-butirnya menggambarkan karakteristik sekolah secara lebih komprehensif ternyata tidak konklusif. Padahal kalau melihat indikator yang digunakan untuk menentukan karakteristik kepala sekolah, di dalamnya sudah tercakup orientasi dunia kerja, misalnya pada butir kepemimpinan dan wawasan manajerial, serta jiwa kewiraswastaan yang erat kaitannya dengan tugas sekolah kejuruan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan mandiri.

#### **Akreditasi Sekolah Kejuruan Berorientasi Dunia Kerja**

Sebagai tindak lanjut untuk mendasari perubahan sistem akreditasi yang diusulkan lewat tulisan ini, perlu dicermati apa yang diamati oleh Resnick (1987) tentang disfungsionalisasi pembelajaran di sekolah untuk diterapkan di dunia kerja. Penelitiannya menunjukkan bahwa seseorang akan berbeda dalam cara belajarnya dan cara mempergunakan pengetahuannya, antara waktu belajar di sekolah dan waktu bekerja di dunia kerja. Empat macam perbedaan ini menyangkut: (1) pembelajaran di sekolah memfokus pada prestasi perorangan, sedangkan kebanyakan setting di luar sekolah memerlukan prestasi bersama (*shared performance*); (2) model pembelajaran di sekolah menekankan evaluasi atau tes tanpa bantuan alat, sedangkan di lapangan kerja terutama untuk keterampilan tinggi disediakan bantuan alat-alat pendukung kemampuan kognitif; (3) pembelajaran di sekolah lebih dominan pada abstraksi pemikiran simbolik, kadang tanpa mempertimbangkan obyek dan situasi yang dalam pekerjaan sangat membantu formulasi permasalahan yang dihadapi; dan (4) kemampuan di sekolah bersifat umum (*decontextualised*), sedang di tempat kerja pengetahuan dan keterampilan yang menunjang kinerja yang optimal selalu bersifat terkait dengan situasinya.

Usulan yang ingin dikemukakan secara konkrit dalam model akreditasi sekolah kejuruan adalah penambahan indikator yang mencerminkan kemampuan sekolah dalam mengantisipasi perubahan di dunia kerja, yang kemudian direfleksikan dalam kemampuan lulusan yang bersifat latent, *transferrable*, dan dapat dikembangkan secara mandiri menghadapi situasi di dunia kerja. Meskipun indikatornya secara rinci perlu dikembangkan lebih lanjut dengan metodologi yang cermat, tetapi beberapa variabel yang diusulkan dalam tulisan ini untuk dimasukkan dalam butir akreditasi (ditambahkan dalam butir yang sudah ada sekarang) tidak terlepas dari paradigma kualitas sekolah yang menyangkut kualitas konteks sekolah, kualitas masukan, kualitas proses pembelajaran, dan kualitas keluaran yang tercermin dari kemampuan lulusannya. Secara rinci hal ini dijabarkan dalam Tabel 6. Secara metodologis, variabel, indikator dan teknik pengukurannya memerlukan studi lebih lanjut yang sekarang sedang dalam tahap perencanaan oleh penulis.

**Tabel 6. Butir Akreditasi Tambahan dengan Orientasi Dunia Kerja**

No.	Komponen Variabel	Butir Akreditasi atau Indikator yang Perlu Ditambahkan
1	KONTEKS SEKOLAH	(a) Hubungan dengan setting DUDI; (b) Track record interaksi dengan DUDI; (c) Iklim kewiraswastaan di sekolah
2	INPUT SEKOLAH	(a) Dukungan DUDI terhadap sekolah; (b) Bentuk-bentuk kemitraan dengan DUDI; (c) Jaringan organisasi alumni yang bekerja di DUDI
3	PROSES PEMBELAJARAN	(a) Integrasi Pengalaman Lapangan/Praktek Industri dalam proses pembelajaran; (b) Intensitas pelaksanaan PSG; (c) Program penunjang seperti job seeking skill dan job-keeping skill serta bimbingan karir kejuruan;
4	KELUARAN (LULUSAN)	(a) Uji kemampuan profesi lulusan; (b) Kemampuan adaptif lulusan; (c) Daya serap lulusan di DUDI, (d) waktu tunggu; (e) Indeks Relevansi Kemampuan Lulusan memasuki DUDI; (f) Dokumen alumni di DUDI

Sebenarnya indikator-indikator tersebut masih bisa ditambah lagi mengingat kompleksnya persoalan mutu sekolah dilihat dari berbagai kepentingan. Namun untuk suatu studi yang bersifat *developmental* yang tentunya memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, awalnya harus dimulai dengan sedikit dahulu untuk kemudian dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan temuan di lapangan.

### **Kesimpulan**

Tulisan ini berangkat dari kerisauan tentang kesenjangan yang lebar antara apa yang dihasilkan sekolah kejuruan dewasa ini dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja dan industri. Keseuaian antara keduanya akan dapat didukung oleh tersedianya informasi tentang akreditasi mutu sekolah yang berfungsi ganda. Di satu sisi, akreditasi dapat digunakan oleh industri sebagai pertimbangan rekrutmen calon tenaga kerja yang mempunyai dasar empirik kuat sebagai indikator kualitas lulusan yang dihasilkan. Di sisi lain, akreditasi dapat digunakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai sarana pembinaan dan pengembangan sekolah menuju tercapainya misi penyelenggaraan sekolah kejuruan secara optimal.

Apabila dalam pelaksanaan sekarang banyak ditempuh cara praktis untuk menentukan peringkat sekolah, antara lain lewat perolehan NEM siswa dalam setiap kali ujian Ebtanas, hal itu harus difahami dalam konteks keterbatasan mekanisme akreditasi yang ada dan kecenderungan masyarakat untuk ingin memperoleh informasi peringkat sekolah dalam waktu relatif cepat. Namun hal ini jangan menutup kenyataan bahwa informasi tersebut dapat menimbulkan distorsi dan kemungkinan daya prediktifnya rendah, apalagi jika dikaitkan dengan indikator sekolah lainnya, yang secara logika harusnya berkaitan erat dengan perolehan NEM.

Khusus untuk akreditasi sekolah menengah kejuruan, mengingat posisinya yang sangat strategis untuk mempersiapkan calon tenaga kerja terdidik yang terampil sebagai tenaga pelaksana pembangunan, perlu ditambahkan butir-butir indikator akreditasi yang berorientasi kepada dunia

usaha dan industri, sebagaimana diusulkan di atas. Pengembangan indikator ini perlu melalui metodologi pengembangan dan verifikasi empirik yang cermat, karena pentingnya fungsi akreditasi sebagai informasi bagi dunia kerja dan bagi masyarakat, di samping sebagai sarana peningkatan mutu sekolah melalui proses pembinaan yang berkesinambungan.

### **Daftar Pustaka**

- Boediono, *et al.* (1992). *Rancangan pola pembangunan jangka panjang 25 tahun kedua dan rencana pembangunan lima tahun keenam pendidikan dan kebudayaan*. Jakarta: EPP-IEES Pusat Informatika Balitbang Dikbud.
- (1992). *Studi mutu efisiensi pendidikan menengah*. Jakarta: EPP-IEES Pusat Informatika Balitbang Dikbud.
- Calhoun, C. and Finch, A. (1976). *Vocational and career education: concepts and operation*. Belmont, CA.: wadsworth Publishing Company.
- Dikmenjur (1996). *Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kepala SMK dan Performa SMK*. Dokumen yang tidak dipublikasikan. Jakarta: Direktorat Dikmenjur.
- Laporan dan Pengolahan Hasil Ebtanas SLTP/SLTA Kejuruan Tahun 1993/1994 di Propinsi Jawa Barat*. Bandung: Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Makagiansar, M. (1992). *Pendidikan dan dunia kerja: Memorandum pandangan Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional*. Jakarta : BPPN.
- McMahon, W. and Boediono (1992). *Education and the economy: the external efficiency of education*. Jakarta: EPP-IEES Pusat Informatika Balitbang Dikbud.

## *Orientasi Dunia Kerja dalam Proses dan Status Akreditasi SMK*

*Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.* Jakarta: Depdikbud

*Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja.* Jakarta: Depnaker

*Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolahh.* Jakarta: Depdikbud.

Profil Kepala Sekolah Menengah Kejuruan.(1995). *Laporan Penelitian.* Jakarta: Indonesia Australia Technical and Vocational Education Project (IATVEP-B).

Raizen, S.A. (1989). *Reforming education for work : a cognitive science perspective.* Berkeley CA.: The National Center for Research in Vocational Education.

Resnick, L.B.(1987). " Learning in School and Out" . *Educational Researcher*, Vol.16, no.9, pp.13-20.

Sukamto (1988). *Perencanaan dan pengembangan kurikulum pendidikan teknologi dan kejuruan.* Jakarta : P2LPTK.

Soetjipto (1992). "Beberapa Indikator untuk Menentukan Akreditasi Sekolah Kejuruan" dalam Sukamto, dkk. (1992) *Peningkatan kualitas pendidikan kejuruan melalui pemantapan profesionalisme tenaga kependidikan.* Research Monograph. Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta.

Swanson, G. (1984). *Excellence in vocational education: A policy perspective.* Columbus, Ohio: The National Center for Research in Vocational Education.

Walter, F. *et al.* (1983). *Standards for colleges or universities preparing teachers.* Columbus, Ohio: Ohio Department of Education.